

**KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KLATEN DI SEKTOR
PENDIDIKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :
FEBRI NUR SYAHIDAH
NIM: 08370050

PEMBIMBING:

1. Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.
2. Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup.

Dalam penelitian ini terdapat pokok masalah yaitu apa pandangan siyasah syar'iyah terhadap kebijakan pendidikan di Klaten, dan apa implementasi kebijakan Pemda Klaten di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, system pembuatan kebijakan, dan kebijakan yang ideal perspektif fikih siyasah. *Field research* adalah jenis penelitian ini, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari data yang diperoleh dari lapangan melalui obserfasi langsung ke sumber-sumber yang mendukung dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dan didukung dengan buku-buku, kitab fikih dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan utama pemberlakuan kebijakan MBS di Klaten adalah peningkatan mutu pendidikan melalui model pengelolaan sekolah yang lebih demokratis. Secara empiris, memang MBS perlu diimplemantasikan sebab model pengelolaan sekolah secara sentralistis yang telah cukup lama diterapkan terbukti kurang mengakomodasi kebutuhan sekolah, menumpulkan daya kreatifitas sekolah, dan mengikis habis *sense of belonging* warga sekolah terhadap sekolahnya. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan klaten belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikankan kemanfaatan yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Meskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah, Hal tersebut tentunya sangat berlawanan dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi "*tasharruful imami ala-tasyri'ati manuutun bilmashlakhah*" yang mempunyai arti kebijakan seorang pemimpin seharusnya berdasarkan atas kemaslahatan manusia.

Dari sudut pandang hak asasi manusia dalam hal keterjangkauan (Accessibility) dalam pemenuhan hak atas pendidikan, di Klaten masih terdapat kendala dalam budaya pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan melanjutkan sekolah bagi anak perempuan. Orang tua masih menganut budaya memberikan prioritas kedua bagi anak perempuan setelah anak laki-laki.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Febri Nur Syahidah
NIM : 08370050
Judul Skripsi : Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten Di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyasah

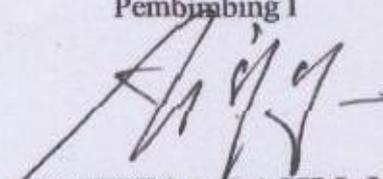
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1433 H
19 Juli 2012 M

Pembimbing I


Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.
NIP. 196630131 199203 1 004



NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Febri Nur Syahidah
NIM : 08370050
Judul Skripsi : Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten Di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyasah.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1433 H
19 Juli 2012 M

Pembimbing II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/215.K/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyasah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Febri Nur Syahidah
NIM : 08370050
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Juli 2012
dengan nilai : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Penguji I

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 20050 1 004

Yogyakarta, 9 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 00

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Febri Nur Syahidah
NIM : 08370050
Semester : VIII
Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul : *“Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyasah”* adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 22 Sya’ban 1433 H
12 Juli 2012 M



Febri Nur Syahidah
NIM : 08370050

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda Bapak Sutanto dan Ibunda Sulari.

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kakakku Eko Novianto dan Taufiqurrohman.

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

MOTTO

“Kebijakan dan kebijaksanaan adalah perisai terbaik.”
(Aspinal)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”
(Aristoteles)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
فعل		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zükira
ذكر		ditulis	u

ذَهَبٌ يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu
--------------------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لَنْنَشْكُرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahimi

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten Di Sektor Pendidikan Perspektif Fikih Siyazah*.

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan,semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas

dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing II Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. selaku Pembimbing I dan Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda Sutamto, Ibunda Sulari, Kakakku Eko Novianto, Taufiqurrohman dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
6. Kepada sahabat terbaikku Kepompong Lisa Aminatul Mukaromah, Tsaniyatul Azizah, Najichah, Ratih Rohani dan Nur Fadilah bersama kalian semuanya menjadi indah. Kepompong is the best forever.

7. Kepada sahabat suka dukaku Dana Fitriana, Ratih Dwi Puspitasari, Ulin Nuha Wijayanti.
8. Seluruh teman-teman kelas Jinayah Siyasah angkatan 2008 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dalam pengembaraan Intelektual di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wallaahu Muwaafiq ilaa Aqwaamit Thariq...

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1433 H
19 Juli 2012 M

Febri Nur Syahidah
NIM: 08370050

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
G. Subyek dan Obyek Penelitian	19
H. Metode Pengumpulan Data	19
I. Metode Analisa Data.....	21
J. Sistematika Pembahasan	22

BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN	23
	A. Kondisi Geografis	25
	B. Kondisi Sosiologis	27
	C. Struktur Dinas Pendidikan Klaten.....	39
BAB III	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TENTANG	
	PENDIDIKAN	42
	A. Teori Kebijakan Pemerintah.....	42
	B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	46
	C. Peningkatan Lembaga Pendidikan	48
	D. Implementasi Pelaksanaan MBS di Klaten	51
BAB IV	ANALISIS	61
	A. Analisis Kebijakan Pendidikan di Klaten Perspektif Fikih	
	Siyasah.....	61
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran-saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Daftar Terjemahan	I
	II. Biografi Ulama ² /Tokoh.....	II
	III. Pedoman Wawancara.....	V
	IV. Surat Izin Penelitian	VI
	V. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua orang harus menjalani pendidikan karena pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan dosen.

Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda.¹ Pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Sedangkan menurut Tirtarahardja dan Sulo,² pendidikan adalah sebagai proses pembentukan pribadi yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian dari individu. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi.

¹Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 69.

²Umar **Tirtarahardja dan S. L. La Sulo**, *Pengantar Pendidikan* (Edisi Revisi) (Jakarta :Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

Hal-hal yang dapat diketahui sebagai landasan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia, berawal dari masa sebelum kedatangan Belanda di Indonesia yaitu zaman Hindu dan Budha serta kerajaan-kerajaan Islam, zaman kolonial Belanda (termasuk Portugis, Inggris, dan sebagainya), zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga sekarang. Pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan sekarang ini, diselingi dengan zaman perlawanan fisik (clash I dan II) dan RIS, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru hingga zaman Reformasi beserta segala inovasi di bidang pendidikan.

Politik pendidikan di Indonesia agaknya mengalami pergeseran dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik. Awal mula intervensi negara terhadap sektor pendidikan ini sangat besar, sangat kental, dan sangat vulgar. Keadaan mencapai puncaknya saat kementerian pendidikan dipegang oleh Daed Joesop. Saat itu tidak ada satupun kebebasan dalam sekolah dan kampus. Bahkan berbeda pendapat pun tidak dimungkinkan. Sekolah dan kampus tak ubahnya kelas besar untuk indoktrinasi ideologi pemerintah (bukan ideologi negara) yang tidak menginginkan adanya kritik terbuka. Kurikulum didisain sedemikian rupa sehingga mata pelajaran yang sifatnya politis menjadi sangat dipentingkan. Mata pelajaran Pancasila, Sejarah, Kewiraan, dan bahkan agama didisain untuk mengentalkan intervensi negara kepada otak, pikiran dan sikap peserta didik.

Seiring dengan kejatuhan rejim 'orde baru' yang interventif tersebut, oleh gerakan reformasi total masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa dan

kalangan terpelajar, muncul era yang penuh semangat untuk mengurangi peran dan campur tangan pemerintah pusat dalam menangani berbagai permasalahan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Inspirasi pertama muncul dari diundangkannya otonomi daerah secara reformis, yaitu UU No.22 tahun 1999. Dikatakan reformis karena sebelum ini sudah pernah ada UU otonomi daerah tetapi tidak memiliki ruh reformasi dan hanya formalitas, yaitu UU No.5 tahun 1975. UU otonomi daerah yang baru itu mengilhami dirumuskannya kebijakan desentralisasi pendidikan.³

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia bukan saja sekedar keinginan dan kemauan, tetapi sudah merupakan suatu keharusan. Pasca gerakan reformasi politik dicanangkan pada tahun 1998, ke depan ini bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat, yang berarti sektor pendidikan harus ditempatkan pada posisi penting dan urgent. Berkaitan dengan urgensi sektor pendidikan itu maka harus dilakukan reformasi dalam pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Menurut Albab⁴, mengatakan ada 3 hal yang dapat menjelaskan urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia, yaitu :

- a. Untuk pembangunan masyarakat demokrasi;
- b. Untuk pembangunan *social capital*; dan
- c. Untuk peningkatan daya saing bangsa.

Pada awal abad XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

⁴ Albab, Desentralisasi Pendidikan. (Jakarta: Sinar Mas, 2004), hlm. 68.

pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, penyebaran sumber daya manusia dengan berbagai macam dan tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, masih dirasakan kurangnya budaya berpikir kritis, penghargaan karya cipta (HAKI) yang belum memadai, kurang efektifnya sistem kelembagaan dan perangkat perundang-undangan serta sertifikasi profesi ilmiah. Berbagai permasalahan tersebut akan dapat diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan, seperti yang telah tercantum dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga, yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat

berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;

8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya .

Penulis menemukan adanya beberapa gedung sekolah dasar yang sudah tidak terpakai dan tidak terurus lagi di beberapa daerah Klaten. Apakah kejadian tersebut disebabkan karena instansi sekolah pindah alamat atau memang tidak beroperasi kembali karena sudah tidak mendapatkan peserta didik baru. Hal tersebut tentunya menarik perhatian penulis untuk mengetahui pokok masalah yang sebenarnya kenapa bisa terjadi.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti kebijakan pendidikan di Klaten karena disamping asal penulis dari Klaten juga penulis memperhatikan mutu pendidikan di Klaten tidak semaju dengan mutu pendidikan di Yogyakarta dan sekitarnya dengan melihat kondisi yang ada dilapangan.

Peran aktif kebijakan pemerintah setempat sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan khususnya Dinas Pendidikan. Melihat realita yang penulis temukan seolah telah terjadi pembiaran oleh Pemda Klaten terkait banyaknya gedung sekolah dasar yang mangkrak dan tidak terpakai, sekolah favorit menjadi rujukan masyarakat sedangkan sekolah non favorit seolah tinggal menunggu waktu menyusul seperti nasib sekolahan dasar yang lain. Hal tersebut akan sangat merugikan bagi masyarakat Klaten

itu sendiri kalau pemerintah daerah Klaten tidak segera mengambil langkah dan kebijakan kongkrit karena akan secara tidak langsung telah terjadi marginalisasi antara masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas. Hal tersebut sangat berbanding lurus dengan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah:

1. Apa pandangan fikih siyasah terhadap kebijakan pendidikan di Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan pemerintah daerah Klaten dalam pandangan fikih siyasah.
 - b. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kebijakan di sektor pendidikan Klaten.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk mengembangkan teori pemberdayaan masyarakat Klaten melalui program Pemerintah Daerah.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan skill masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam mengelola SDM/SDA di dalam ruang lingkup daerah pada khususnya dan ruang lingkup nasional pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau studi kepustakaan adalah sebuah kajian yang pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁵

Kaitannya dengan judul penelitian yang penulis buat yaitu *Kebijakan Pemerintah Klaten di Sektor Pendidikan Perspektif Siyash Sar'iyah*, maka penulis berusaha untuk mengkaji terhadap hasil penelitian sebelumnya berupa buku-buku yang isinya relevan dan memiliki hubungan topik dengan penelitian yang penulis lakukan.

Adapun karya-karya lain yang berhubungan dengan obyek pembahasan di atas adalah skripsi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Malang Sebagai Kota Pendidikan*, yang ditulis oleh Pratama, Andy, Wahyu.⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Malang Sebagai Kota Pendidikan.

Terdapat juga dalam karya ilmiah oleh Kholifaturrohman yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal di Desa Tambak Rejo Kecamatan

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 183.

⁶ Pratama, Andy, Wahyu, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Malang Sebagai Kota Pendidikan”, skripsi sarjana Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS, Universitas Negeri Malang 2009.

Bulupesantren Kabupaten Kebumen”.⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan khususnya pendidikan non formal.

Meskipun kewajiban pemerintah daerah sudah ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas, namun secara eksplisit kewajiban-kewajiban tersebut masih bersifat umum. Penjelasan yang lebih spesifik termaktub dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.”⁸ Yang dimaksud dengan “daya saing daerah” dalam ayat ini adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.⁹

Edi Suharso, dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, secara garis besar menyatakan bahwa gerakan membangun dan memberdayakan masyarakat memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan isu-isu lokal dan global. Karenanya, tema-tema pemberdayaan masyarakat dan pembangunan rakyat yang dibahas tidak hanya menakup arus lokal. Melainkan pula arus global. Suharto mencoba

⁷ Kholifaturrohman, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal di Desa Tambak Rejo Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen”. Skripsi sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri 2010.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

menjelaskan konsepsi tentang pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Selanjutnya ia juga mengkaji isu-isu strategis mengenai bagaimana selayaknya membangun dan memberdayakan rakyat dilakukan secara partisipatif, dinamis dan sekaligus multidimensional.¹⁰

Hubungan dengan analisis kebijakan sosial, Suharto merumuskan lima topik yang harus dibahas dalam persoalan ini, yang meliputi batasan kebijakan sosial, model analisis, dan yang terakhir adalah kerangka kerja melakukan analisis kebijakan sosial.¹¹

Moeljarto Tjokrowinoto dalam bukunya yang berjudul *Pembangunan Dilema dan Tantangan* secara garis besar menyatakan peningkatan sumber daya manusia merupakan faktor strategis pembangunan nasional dimensi pengembangan kepribadian. Dalam mencapai momentum pembangunan, sumber daya manusia akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan.¹²

Moeljarto menyatakan bahwa pembangunan desa yang terlalu bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang sentralistik, akan mengurangi kreatifitas dan komitmen masyarakat desa, kurang menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri, dan menimbulkan dependensi masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. vii-viii.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹² Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 46.

desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.¹³

Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian perlu adanya perubahan wawasan pembangunan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: reorientasi birokrasi, sistem perencanaan melalui informasi komunitas, proyek pembangunan pedesaan sebagai eksperimen sosial, mobilisasi sumber-sumber sosial-kultural, pembinaan jaringan sosial, pengembangan teknologi pedesaan di dalam melaksanakan pembangunan masyarakat, dan yang terakhir adalah pembangunan desa menuju desa yang mandiri harus dapat melihat kreatifitas, komitmen dan sifat inovatif masyarakat desa sebagai sumber utama pembangunan.¹⁴

Berdasarkan pemaparan dari beberapa karya di atas, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa karya-karya tersebut masih berbicara atau membahas pokok persoalan pada dataran teori. Sedangkan apa yang dilakukan penulis dalam melakukan dan menyusun hasil penelitian ini adalah lebih difokuskan pada persoalan praktek di lapangan. Mengapa demikian? Sebab yang dinamakan sebuah kebijakan dan implementasinya dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebuah wujud aplikasi dari teori, konsep atau landasan yang digariskan oleh instansi atau

¹³ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, hlm. 41.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

lembaga yang berwenang. Atau dengan kata sederhana, praktek penerapan kelanjutan dari teori. Dengan demikian nantinya dapat diketahui seberapa besar efektifitas kebijakan pemerintah Klaten terutama di bidang pendidikan.

E. Kerangka Teori

Herebert Blumer sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata menyatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁵

Berdasarkan kamus ilmiah populer, “kebijakan” berasal dari kata bijak, yang berarti pandai mempergunakan akal, cendikia.¹⁶ Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

¹⁶ Pius A Partanto, M. Dahlan AL-Barry, *Kamus ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 73.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan.¹⁷

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di masyarakat, maka yang bertugas melaksanakan kebijakan ini adalah pemerintah daerah itu sendiri melalui departemen atau instansi-instansi yang berada di dalam bagian pemerintah daerah. Dalam prakteknya di lapangan, departemen atau instansi-instansi pemerintahan bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial, LSM, kalangan akademisi, maupun lembaga-lembaga lain non pemerintah, bahkan termasuk tokoh masyarakat. Tujuannya adalah agar mudah merealisasikan kebijakan tersebut dan secara berlanjut bisa terus dipantau.

Agar kebijakan pemerintah bisa terealisasi dengan baik sesuai yang diharapkan, dan agar tidak terjadi penyimpangan, maka dalam pelaksanaannya kebijakan pemerintah daerah harus diawasi. Adapun tugas pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah daerah adalah DPRD. Hal ini sudah ditegaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 42 poin C, dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

¹⁷ Dun, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional daerah.

Dasar Dari Pendapat Para Ulama

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan *siyasah*. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan *syara'*. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan ibn al-Qayyim: “*Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai syara.*”

Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan *syara'* berarti harus sesuai dengan *manthuq-nya syara'* atau berarti kewajiban penyelenggaraan semangat *siyasah syar'iyah* atau berarti kemafhuman *syara'*.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua alternative kedua jawaban, tetapi menggabungkan kedua alternative jawaban yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah sya'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara'* secara *manthuq*. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pelaksanaan *siyasah syar'iyah* lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil serupa itu, *fiqh siyasah syar'iyah* dapat diselenggarakan pada tempat dan waktu yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan *fiqh siyasah syar'iyah* yang pertama kali. Dengan kata lain, maka universalitas nilai *siyasah syar'iyah* terbuhul manakala ia mampu

menyantuni beban dan tuntutan yang muncul lantaran perbedaan tempat dan waktu.

Untuk kepentingan itu, Abu Ishak al-Syatibi mengusulkan teori maqashid al-syariah sehubungan dengan pelaksanaan *siyasah syariah*. Baginya, *siyasah* tidak hanya bertumpu kepada maqasid al-Syariah-nya, tetapi juga bertumpu kepada *washail*-nya, semisal *sadz al-Dzari'ah* dan *farh al-Dzari'ah* yang ditempuh dalam pelaksanaannya.

Al-Syatibi, misalnya menyebutkan bahwa, untuk memelihara yang bersifat *Dharuriyyah* (seperti; agama, jiwa, keturunan, dan harta) perlu diperhatikan dua hal yang penting. Dalam hubungan ini, kedua hal itu adalah; (1) pembinaan terhadap usaha-usaha yang dapat memelihara “perwujudan hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* di atas (*min janib al-wujud*) dan (2) pertahanan dari usaha-usaha yang dapat mengakibatkan “penghilangan hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* di atas (*min janib al-adam*). Dalam memelihara akal, misalnya kebijakan mewajibkan melarang masyarakat untuk belajar merupakan usaha *min janib al-wujud*, sedangkan kebijakan melarang masyarakat untuk menyalah gunakan obat (yang dapat menurunkan minat dan prestasi belajar mereka) merupakan usaha *min janib al-adam*. Dalam perspektif kekinian, barangkali usaha pertama mirip dengan pengertian yang dikandung dalam istilah “perekayasa masyarakat” (*social engineering*) dan usaha kedua mirip dengan pengertian yang dicakup dalam istilah “pengendalian masyarakat” (*social control*).

Abdul Kadir Audah menyebutkan bahwa rakyat mempunyai 2 hak yaitu:

1. Hak persamaan.
2. Hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki.¹⁸

Masalah hak sebenarnya adalah masalah ijihadiyah. Kewajiban itu berimbangan hak. Oleh sebab itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* maka tidak akan lepas dari *Maqasidu syari'ah*, maka hak rakyatpun tidak lepas dari *Maqasidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam al-Qur'an telah di tegaskan salah satu hak dan kewajiban pemimpin serta yang dipimpinnya yakni :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً¹⁹.

Hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang di gariskan untuk kemaslahatan bersama.

Apabila Pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajiban masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. *Imam* yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat dan rakyat yang melaksanakan kewajiban berarti pula memenuhi hak *Imam*.

¹⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 64.

¹⁹ An Nisa' (4) : 59.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁰

Kebijakan Pemerintah Daerah Klaten dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan merupakan salah satu amanat yang harus direalisasikan dalam hal kewajiban *iman* kepada rakyat. Oleh sebab itu untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan pemerintah daerah Klaten dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dilakukan penelitian lebih mendalam agar dapat diketahui sejauh mana pemenuhan Hak dan kewajiban rakyat maupun pemimpin di Klaten terkait masalah pendidikan.

F. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit tersebut.²¹

Penelitian ini bersifat kualitatif (*Qualitative Research*) yakni jenis penelitian yang hasil penemuannya tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau cara lain kuantitatif (pengukuran).²² Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara mendalam terhadap subyek penelitian.

G. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

²⁰ Al Anbiya (22) :109.

²¹ Safidin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

²² AnSelm Strauss Julied Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

Yang menjadi subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Obyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah kebijakan pemerintah Klaten di bidang pendidikan dalam kerangka pembangunan daerah Klaten.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan di teliti, kegunaanya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.²³ Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Klaten. Dengan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dengan teliti dan mencatat data-data yang di peroleh secara sistematis.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang di lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (pengumpul data bertatap muka dengan responden).²⁴ Jenis wawancara yang di gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pewawancara menentukan sendiri urutan dan juga

²³ Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 135.

²⁴ Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi, Cet ke-5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 52

pembahasannya selama wawancara,²⁵ baik itu wawancara secara langsung maupun tertulis apabila narasumber sulit ditemui. Melalui metode ini di harapkan permasalahan dapat terjawab secara jelas dan mendetail.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan apa-apa yang sudah berlalu melalui sumber dokumen yang ada.²⁶ Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-memilih dokumen sesuai dengan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya, serta menghubungkan-hubungkannya dengan fenomena lainnya. Dalam penelitian ini data-data akan di kumpulkan sehingga data sekunder berupa dokumen penting yang terhubung dengan suber data penelitian ini dan gambaran umum pemda Klaten dan dokumen lainnya.

I. Metode Analisa Data

Analisis berarti menguraikan, maka menganalisis berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data tersebut pada gilirannya dapat di trik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.²⁷ Analisis

²⁵Britha Mikhelsen, Metode penilitin Parsitipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan (Jakarta: Yayasa Obor Indonesia, 1999), hlm. 128.

²⁶ Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3S, 1995), hlm.152.

²⁷ Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnian Kalam Semesta, 2003), hlm. 65.

juga berarti memisahkan, membedakan, melihat nuansa, dan menyelami, selanjutnya untuk melihat adanya keteraturan dan keterkaitan.²⁸

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah penulis dalam menganalisis data tersebut adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Melakukan editing terhadap seluruh data yang masuk.
3. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
4. Dan melakukan analisa seperlunya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari bagian yaitu: Pendahuluan, Pokok bahasan dan penutup yang dipaparkan dalam beberapa bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang gambaran umum Kabupaten Klaten dilihat dari segi geografis dan sosiologis. Pembahasan kondisi Klaten secara geografis adalah pembahasan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Sedangkan

²⁸ Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj.) Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 3.

pembahasan secara sosiologis adalah berdasarkan kepada keadaan sosial masyarakat.

Bab Ketiga gambaran umum tentang kebijakan pemerintah Klaten terhadap pendidikan meliputi pembahasan tentang teori kebijakan pemerintah, sistim pembuatan kebijakan, implementasi Kebijakan pemerintah Daerah Klaten terhadap Pendidikan.

Bab empat berisi tentang penerapan, analisis dan praktek di lapangan atas kebijakan pemerintah daerah Klaten di sektor pendidikan.

Bab lima, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah Klaten telah mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, namun praktek dilapangan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah Klaten disektor pendidikan. Pemerintah daerah belum dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana sekolah serta biaya operasional sekolah, yang sebelumnya kebutuhan tersebut dipenuhi oleh partisipasi masyarakat ataupun dari perusahaan yang peduli dibidang pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah daerah untuk menggalang dana dari orang tua siswa. Akibat larangan tersebut, banyak kegiatan sekolah yang sebelumnya ada menjadi terhenti.

Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten belum sepenuhnya berdampak signifikan kepada masyarakat Klaten, hal tersebut tercermin dengan masih adanya sebagian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang mengeluhkan adanya pungutan-pungutan biaya sekolah yang tidak wajar serta masih tingginya biaya pendidikan meskipun pemerintah pusat telah mencanangkan program pendidikan gratis, tentu saja pandangan fikih siyasah terhadap kebijakan pendidikan di Klaten kurang sesuai terhadap apa yang telah di implementasikan selama ini. kebijakan seorang pemimpin seharusnya

berdasarkan atas kemaslahatan manusia sesuai kaidah Fikhiyyah “*Tasharraful imami ‘ala syar’iyati manuutun bil-almashlakhah*”. Pemerintah seharusnya menghapuskan segala bentuk biaya atas pendidikan agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua kelas dalam strata sosial demi menjaga kemaslahatan manusia dalam hal pendidikan.

Setelah adanya pelarangan dari pemerintah daerah mengenai partisipasi pendanaan dari masyarakat/orang tua murid, sedangkan pemerintah daerah tidak dapat mengganti dana tersebut menyebabkan kegiatan ekstrakurikuler, laboratorium, remedial test menjadi terhenti. Hal tersebut berakibat penurunan kualitas pendidikan dasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui evaluasi pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ini adalah:

1. Pememrintah daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang meliputi sarana dan prasana sekolah serta biaya operasional sekolah.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi pendanaan yang semula berasal dari partisipasi masyarakat harus menjadi tanggung jawab pemerintah/pemda sepenuhnya.
3. Diperlukan subsidi silang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas pada sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan mutu yang sama antara sekolah regular maupun sekolah RSBI/SBI.

4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBS mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mengeliminasi (memberantas) praktik-praktik korupsi di sekolah. Dengan begitu upaya peningkatan mutu dapat terealisasi lebih awal dari pada waktu yang diperkirakan.
5. Diharapkan adanya gerakan yang peduli terhadap pendidikan bagi masyarakat bagi miskin, seperti Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) yang bersifat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989

2. Lain-lain

Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, *Syrah al-Qawa'id al Fiqhiyyah*, Dar- AlQalam, Damascus, 1989.

Albab, *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Sinar Mas, 2004.

Angga Jaya, *Kebijakan Publik dan Masyarakat*, Jakarta: ALFABETA, 2008.

AnSelm Strauss julied Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1988.

Badan penelitian dan pengembangan HAM Departemen hukum dan HAM, *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan MBS*, Yogyakarta: Departemen Hukum dan HAM 2009.

Bridgman Davis, *Proses Perumusan Kebijakan*, Jakarta: Kencana 2004.

Britha Mikhelsen, *Metode penelitin Parsitipatoris dan upaya-upayaPemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Drijakara Sujaya, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, hlm. 69.

- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnian Kalam Semesta, 2003.
- Dun, william. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2006.
- Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa an- nadhair fi al- Furu'*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Kholifaturohman, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal di Desa Tambak Rejo Kecamatan Bulupesanren Kabupaten Kebumen". Skripsi sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri 2010.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Parsons Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pius A Partanto, M. Dahlan AL-Barry, *Kamus ilmiah Populer*.
- Pratama, Andy, Wahyu, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Malang Sebagai Kota Pendidikan", skripsi sarjana Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS, Universitas Negeri Malang 2009.
- Djazuli, A, *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Cet ke-5*
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, (Terj.) Dick Hartoko,
Jakarta: Gramedia, 1991.

Wa an-Nadhair 'ala madzhab Abi Hanifah, An-Nu'man, Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, Beirut, 1993.

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/bataswilayah.php?ia=3310&is=35> di akses pada tanggal 23 Mei 2012

3. Kelompok Wawancara

Wawancara dengan Andi W. staf dinas pendidikan Klaten. Padatanggal 19
Juni 2012

Wawancara dengan Sujiwanto,debuti Bupati Klaten pada tanggal 22 Juni2012

4. Perundang-Undangan

Undang-undang Otonomi Daerah nomor 32 Tahun 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I		
18	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah, dan yang memegang kekuasaan di antara kamu.
19	20	Dan Aku tiada mengutusmu kecuali untuk Rohmatan lil ‘alamin.
BAB IV		
64	4	Kebijakan seorang pemimpin harus didasari atas kemaslahatan umat.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Prof. H. Munim Salim

Beliau adalah sebagai guru besar UIN Alauddin, almarhum juga rektor Universitas Indonesia Timur sejak tahun 2002. Dalam bidang sosial, almarhum tercatat sebagai Ketua Dewan Syura KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam), Wakil Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia, dan Anggota Lajnah Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Di samping itu, almarhum juga aktif membina pengajian bersama masyarakat di sekitar rumahnya.

Profesor yang sangat sederhana, kata Anwar Abd. Rahman, dosen Fakultas Adab dan Humaniora. Dilihat dari rumahnya, sulit rasanya percaya ada seorang guru besar, mantan rektor, memiliki rumah yang beberapa bagian plafonnya sudah rusak. Rumah sudah tampak tuaberada di perkampungan, jauh dari kawasan kota. Menurut Anwar, dia pernah jadi stafnya ketika almarhum menjabat Pembantu Rektor I sekitar tahun 1996, kesan sederhana dan ramah sudah tampak dari almarhum. “Saya diajari komputer dan sering dibawakan makanan”, kenang Anwar.

2. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Medina], Sumatera Utara, tanggal 8 oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun

1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Bulan Agustus 2003 pergi ke McGill University dalam rangka kerjasama penelitian dengan Dr. Ian S. Butler. Bulan Oktober 2003-Januari 2004 mengikuti Post-Doct Progran di Leiden University, Leiden Belanda.

Suami Any Nurul Aini, SH ini berusaha aktif menulis di sejumlah Jurnal. Adapun karya yang telah lahir dari Bapak tiga anak: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkia Amalia Nasution (1 Maret 1996), dan Affan Yasir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah : (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Penyunting Tafsir-tafsir baru di era multicultural*, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (5) *Penyunting /editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Muzhar, Hukum Keluarga di dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*, (6) *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*.

Pekerejaan rutin adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sampingitu mengajar juga di Program Magister Studi Islam (MSI), UII, MSI UNISMA Malang, Program Internasional Fakultas Hukum UII Yogyakarta, dan STIS (Islamic Business School) Yogyakarta.

3. Abdul Malik Madaniy

Beliau lahir di Tanah Merah, Bangkalan, Madura, pada 9 Januari 1952. Menjalani Sekolah Rakyat (SR) di Tanah Merah (lulus tahun 1964), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bangkalan (lulus 1967) dan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) Sunan Ampel Bangkalan (lulus 1970). Melanjutkan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1976. Selanjutnya mengikuti program pasca sarjana bidang studi Islam dan lulus S-2 pada tahun 1987. Pada 18 Januari 2010

menempuh promosi doctor di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, almamaternya sejak program S-1, dengan judul disertasi: *israiliyyat dan Maudhu'at dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Jalalain)*.

Kegiatan nyantri telah dimulainya sejak di Madura dan berlanjut di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah bimbingan alm. K.H. Ali Ma'sum (Rais 'Aam PBNU era delapan puluhan).

Sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah, Beliau mrnjabat sebagai Pembantu Dekan selam beberapa periode, dan pada 2003-2007 menjabat Dekan di fakultasnya. Di samping itu, dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, ia duduk sebagai Katib Syuriyah PBNU (2004-2010) setelah seblumnya menjabat Wakil Rais Syuriyah PWNU DIY. Di MUI Provinsi DIY, beliau duduk sebagai Wakil Ketua.

4. Asy-Syafi'i

Ia dikenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'I dilahirkan di kota Qaza (Palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke makkah, kota ia belajar hadis dengan Muslim Al Zanj dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota madinah dan belajar dengan Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir ia merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selama di Baghdad (Qoul Qadim) dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan Qaul Jadid atau Madzhab Jadid (Pendapat baru). Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalam kitab "al-'Um". Selain itu Imam Syafi'I juga menulis kitab "Musnad".

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KLATEN DI SEKTOR PENDIDIKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Pendidikan klaten di sektor pendidikan?
2. Kendala-kendala yang dihadapi apa saja?
3. Sambutan atau tanggapan masyarakat klaten atas kebijakan yang di keluarkan Dinas Pendidikan?
4. Bagaimana Dinas Pendidikan menanggapi dengan adanya beberapa sekolah dasar yang sudah tidak beroperasi lagi?
5. Kalau dilihat dan dibandingkan dengan daerah sekitar klaten, Apakah klaten lebih baik atau lebih buruk dalam hal upaya penyelenggaraan pendidikan dengan daerah sekitas? Mengapa demikian?
6. Sejauh mana peran Dinas Pendidikan klaten dalam upaya mewujudkan pendidikan yang di amanatkan sesuai undang-undang?
7. Apa Visi dan Misi Dinas Pendidikan Klaten?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.01.1//2011
2012
Lamp. : 1 Bandel Proposal
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 11 April

Kepada :
Yth. Ketua Dinas Pendidikan
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

Nama : Febry Nur Syahidah
NIM : 08370050
Semester : VIII
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)
Judul Skripsi : Kebijakan Dinas Pendidikan Klaten di Sektor Pendidikan Perspektif Fiqih Siyasah

Guna mengadakan penelitian (riset) di Dinas Pendidikan Klaten Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



Kegiatan Workshop penigkatan kompetensi guru

Sekolah-sekolah yang sudah tidak aktif lagi



SD Ceporan 1



SD Negeri 3 Ngandong.



SD Negeri 2 Katekan.



SD Negeri Towangsan 2.

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Febri Nur Syahidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 29 Februari 1988
Alamat : Sembungan Towangsan Gantiwarno Klaten RT/RW :
14/06.
Nama Ayah : Sutamto
Nama Ibu : Sulari
Alamat : Sembungan Towangsan Gantiwarno Klaten
RT/RW : 14/06.

Motto : Berusaha melakukan yang terbaik lebih baik
daripada berkatayang terbaik.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Muhammadiyah Wedi Klaten 1994-2000
2. SMP Ponpes Gontor Mantingan Ngawi 2001-
2004
MAN Ta'mirul Islam Surakarta 2004-2008
3. Jurusan Jinayah Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-2012